



BUPATI TUBAN

**PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 55 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu mengatur alokasi dan penyaluran Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

ee / 9/1

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

20 / 7 / 1

Memperhatikan : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TUBAN TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Tuban.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Tuban.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa.
11. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II PENGALOKASIAN

Pasal 2

- (1) Pengalokasian besaran Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis.
- (2) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh faktor yang meliputi:
 - a. ketersediaan pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur;
 - c. transportasi; dan
 - d. komunikasi Desa ke Kabupaten.
- (3) Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan bobot:
 - a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
 - c. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan.
- (4) Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai faktor pengali hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 3

Besaran Dana Desa setiap Desa dihitung dengan cara:

- a. Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa Kabupaten Tuban x [(30% x persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di Kabupaten Tuban yang bersangkutan) + (20% x persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di Kabupaten Tuban yang bersangkutan) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga Desa di Kabupaten Tuban yang bersangkutan)]; dan
- b. hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.

Pasal 4

Besaran Dana Desa setiap Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

ef 4/1

**BAB III
PENYALURAN**

Pasal 5

Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten kepada Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa.

Pasal 6

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan setelah APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :

- a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
- c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).

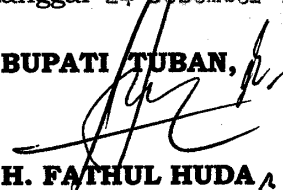
**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

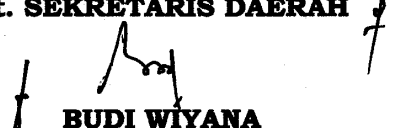
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 24 Desember 2014


BUPATI TUBAN,
H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 24 Desember 2014

Pt. SEKRETARIS DAERAH


BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2014 SERI E NOMOR 51.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TUBAN
 NOMOR 55TAHUN 2014
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
 DANA DESA KABUPATEN TUBAN

**BESARAN DANA DESA
 KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015**

NO	KECAMATAN / DESA	DANA DESA (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	KEC. KENDURUAN	
	1.1. Jlodro	153,661,573.37
	1.2. Sokogunung	171,584,348.52
	1.3. Jamprong	300,201,649.09
	1.4. Tawaran	199,178,790.49
	1.5. Sidomukti	144,960,473.88
	1.6. Bendonglateng	125,020,961.15
	1.7. Sidohasri	140,382,882.27
	1.8. Sidorejo	132,695,361.55
	1.9. Sokogrenjeng	194,279,276.51
2	KEC. JATIROGO	
	2.1. Kebonharjo	94,596,442.11
	2.2. Wangi	140,302,218.30
	2.3. Ketodan	101,034,690.14
	2.4. Karangtengah	114,040,850.17
	2.5. Bader	57,534,459.42
	2.6. Paseyan	85,494,151.36
	2.7. Besowo	143,082,614.90
	2.8. Jombok	64,038,872.42
	2.9. Sadang	71,436,317.13
	2.10. Wotsogo	63,910,521.17
	2.11. Ngepon	134,895,251.77
	2.12. Sugihan	89,760,581.14
	2.13. Sidomulyo	75,828,268.77
	2.14. Kedungmakam	97,452,956.42
	2.15. Demit	120,093,191.16
	2.16. Jatiklabang	148,354,770.15
	2.17. Sekaran	200,271,838.12
	2.18. Dingil	151,963,197.61
3	KEC. BANGILAN	
	3.1. Klakeh	81,532,209.54
	3.2. Bate	154,490,203.90
	3.3. Sidotentrem	215,875,676.82
	3.4. Kedungjambangan	163,476,480.03

Handwritten signature or initials

(1)	(2)	(3)
	3.5. Kablukan	117,123,478.80
	3.6. Sidokumpul	143,386,476.44
	3.7. Bangilan	126,325,794.51
	3.8. Sidodadi	113,855,203.66
	3.9. Kumpulrejo	290,320,052.57
	3.10. Banjarworo	198,819,793.45
	3.11. Ngrojo	70,870,410.24
	3.12. Weden	88,278,717.44
	3.13. Kedungharjo	103,520,122.98
	3.14. Kedungmulyo	199,340,087.85
4	KEC. BANCAR	
	4.1. Tlogoagung	221,442,017.04
	4.2. Ngujuran	168,976,124.07
	4.3. Latsari	189,856,253.65
	4.4. Sukolilo	72,050,304.62
	4.5. Tenggerkulon	96,346,945.16
	4.6. Bulujowo	142,958,944.36
	4.7. Siding	129,417,146.98
	4.8. Tergambang	89,141,011.47
	4.9. Bulumeduro	37,941,367.16
	4.10. Banjarjo	154,778,871.72
	4.11. Boncong	66,986,483.51
	4.12. Jatisari	65,749,688.76
	4.13. Sumberan	79,361,316.63
	4.14. Kayen	97,249,237.54
	4.15. Bogorejo	79,083,681.24
	4.16. Sembungin	137,274,046.52
	4.17. Karangrejo	120,141,002.39
	4.18. Sukoharjo	164,509,712.11
	4.19. Pughoh	109,829,655.22
	4.20. Bancar	58,590,265.91
	4.21. Ngampelrejo	130,446,394.02
	4.22. Sidomulyo	108,967,076.83
	4.23. Margosuko	114,849,690.44
	4.24. Cingklung	44,349,680.12
5	KEC. SENORI	
	5.1. Medalem	284,496,064.17
	5.2. Jatisari	154,835,678.13
	5.3. Kaligede	216,224,727.72
	5.4. Banyuurip	66,753,089.74
	5.5. Leran	132,535,492.87
	5.6. Wonosari	138,068,993.40
	5.7. Sendang	127,650,324.19
	5.8. Wanglu Kulon	144,474,396.53
	5.9. Wanglu Wetan	94,256,258.28

el | 7/2

(1)	(2)	(3)
	5.10. Sidoharjo	284,922,439.66
	5.11. R a y u n g	237,957,516.33
	5.12. Katerban	184,266,379.93
6	KEC. TAMBAKBOYO	
	6.1. Dikir	152,854,663.10
	6.2. Ngulahan	164,636,655.81
	6.3. Plajan	61,995,568.54
	6.4. Mander	193,654,094.54
	6.5. Belikanget	66,078,065.41
	6.6. Cokrowati	134,607,649.74
	6.7. Pulogede	66,848,181.53
	6.8. Gadon	49,393,221.69
	6.9. Sotang	65,933,612.67
	6.10. Pabeyan	54,097,203.17
	6.11. Klutuk	126,274,460.97
	6.12. Tambakboyo	74,481,318.45
	6.13. Dasin	180,947,753.83
	6.14. Kenanti	40,326,447.66
	6.15. Sawir	189,400,728.90
	6.16. Sobontoro	52,863,173.64
	6.17. Merkawang	111,226,890.46
	6.18. Glondonggede	96,731,987.33
7	KEC. SINGGAHAN	
	7.1. Laju Kidul	204,933,487.85
	7.2. Lajo Lor	182,478,898.16
	7.3. Tanggir	114,536,626.68
	7.4. Tanjungrejo	142,372,058.77
	7.5. Binangun	182,108,115.03
	7.6. Mergosari	123,696,380.88
	7.7. Mulyoagung	224,299,618.96
	7.8. Tunggulrejo	143,836,237.66
	7.9. Tingkis	181,591,106.58
	7.10. Mulyorejo	122,616,883.12
	7.11. Saringembat	230,579,341.56
	7.12. Kedungjambe	231,500,841.18
8	KEC. K E R E K	
	8.1. Gemulung	288,776,544.57
	8.2. Sidonganti	352,774,276.09
	8.3. Trantang	138,489,026.96
	8.4. Wolutengah	208,336,529.74
	8.5. Tenggerwetan	195,632,673.26
	8.6. G a j i	151,996,348.82
	8.7. Hargoretno	163,940,266.45

22/1/12

(1)	(2)	(3)
	8.8. Padasan	121,446,350.79
	8.9. Margorejo	233,150,684.31
	8.10. Kedungrejo	145,715,828.08
	8.11. Jarorejo	167,760,998.73
	8.12. Mliwang	102,339,360.68
	8.13. Kasiman	69,176,857.08
	8.14. Margomulyo	56,053,665.87
	8.16. Temayang	78,672,521.37
	8.17. Sumberarum	81,444,785.21
	8.18. Karanglo	129,482,887.55
9	KEC. PARENGAN	
	9.1. Sembung	95,219,305.78
	9.2. Kemlaten	58,838,838.33
	9.3. Sukorejo	184,130,547.75
	9.4. Ngawun	118,780,281.54
	9.5. Mergoasri	86,266,216.34
	9.6. Kumpulrejo	226,582,456.55
	9.7. Parangbatu	168,160,095.94
	9.8. Wukirharjo	220,050,850.19
	9.9. Cengkong	70,902,938.25
	9.10. Brangkal	97,808,528.31
	9.11. Margorejo	130,775,753.21
	9.12. Dagangan	218,197,239.38
	9.13. Suciharjo	166,110,230.67
	9.14. Pacing	139,906,150.79
	9.15. Selogabus	173,096,424.95
	9.16. Sugihwaras	150,189,839.78
	9.17. Sendangrejo	89,145,461.42
	9.18. Mojomalang	168,091,479.84
10	KEC. MONTONG	
	10.1. Guwoterus	209,002,669.30
	10.2. Nguluhan	122,891,878.16
	10.3. Tanggulangin	239,021,855.71
	10.4. Manjung	184,707,023.17
	10.5. Talangkembar	292,730,846.55
	10.6. Montongsekar	120,577,873.05
	10.7. Pakel	145,805,115.76
	10.8. Sumurgung	293,165,886.06
	10.9. Bringin	158,393,550.71
	10.10. Pucangan	198,479,019.67
	10.11. Maindu	237,919,057.08
	10.12. Jetak	359,430,035.01
	10.13. Talun	124,433,045.05

21/9/1

(1)	(2)	(3)
11	KEC. S O K O	
	11.1. Tluwe	149,531,312.23
	11.2. Wadung	115,800,318.82
	11.3. Jati	149,529,995.02
	11.4. Menilo	151,215,267.63
	11.5. Cekalang	111,376,225.68
	11.6. Pandanagung	143,293,883.39
	11.7. Pram. tergayang	122,403,477.13
	11.8. Klumpit	260,413,415.82
	11.9. Simo	136,548,782.23
	11.10. Mentoro	197,130,976.03
	11.11. Kendalrejo	117,483,289.36
	11.12. Nguruan	208,449,643.98
	11.13. Jegulo	334,805,511.80
	11.14. Sokosari	68,152,308.46
	11.15. Bangunrejo	233,737,465.46
	11.16. Mojoagung	178,995,780.45
	11.17. Gununganyar	195,612,065.77
	11.18. Sumurcinde	177,993,988.20
	11.19. Pandanwangi	148,545,368.12
	11.20. Sandingrowo	234,511,621.76
	11.21. Rahayu	168,502,730.84
	11.22. Glagahsari	112,205,633.48
	11.23. Kenongosari	117,824,942.24
12	KEC. J E N U	
	12.1. Karangasem	139,843,012.62
	12.2. Socorejo	159,510,346.43
	12.3. Temaji	255,849,351.78
	12.4. Purworejo	11,239,586.07
	12.5. Tasikharjo	102,509,733.20
	12.6. Sumurgeneng	196,596,820.30
	12.7. Suwalan	133,170,346.98
	12.8. R e m e n	112,853,116.75
	12.9. B e j i	123,806,723.81
	12.10. Wadung	127,128,652.58
	12.11. Rawasan	117,331,537.24
	12.12. Mentoso	122,625,371.95
	12.13. Jenggolo	127,031,986.48
	12.14. Kaliuntu	96,029,950.03
	12.15. Sekardadi	75,011,675.23
	12.16. J e n u	48,655,259.08
	12.17. Sugihwaras	167,285,207.61

20/1/12

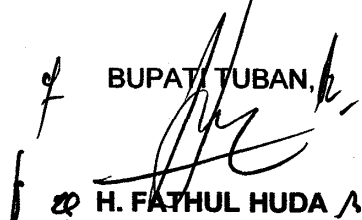
(1)	(2)	(3)
13	KEC. MERAKURAK	
	13.1. Tlogowaru	84,941,654.09
	13.2. T o b o	129,266,467.85
	13.3. Temandang	140,137,330.11
	13.4. Tuwiri Wetan	189,796,029.90
	13.5. Pongpongan	190,691,453.43
	13.6. Tuwirikulon	96,986,365.43
	13.7. Sugihan	220,136,884.94
	13.8. Senori	163,786,295.29
	13.9. Sembungrejo	66,078,315.58
	13.10. K a p u	190,754,002.37
	13.11. Tahulu	243,746,231.97
	13.12. Tegalrejo	133,586,904.92
	13.13. Borehbangle	91,531,887.36
	13.14. Sambonggede	38,878,616.01
	13.15. Sumber	73,148,107.89
	13.16. Mandirejo	93,180,690.67
	13.17. Sendanghaji	57,780,658.87
	13.18. Bogorejo	42,155,466.42
	13.19. Sumberjo	78,220,104.82
14	KEC. RENGEL	
	14.1. Kebonagung	75,792,356.91
	14.2. Pekuwon	233,336,233.39
	14.3. Rengel	45,470,447.08
	14.4. Maibit	179,561,904.02
	14.5. Bulurejo	201,400,279.14
	14.6. Karangtinoto	142,317,697.38
	14.7. Sawahan	86,118,207.19
	14.8. Kanorejo	129,018,347.12
	14.9. Tambakrejo	111,952,694.10
	14.10. Ngadirejo	98,554,955.32
	14.11. Sumberejo	105,812,586.35
	14.12. Punggulrejo	135,953,731.60
	14.13. Campurejo	126,053,018.71
	14.14. Banjaragung	136,891,686.77
	14.15. Banjararum	165,934,735.67
	14.16. Prambonwetan	76,195,227.83
15	KEC. SEMANDING	
	15.1. J a d i	443,292,235.60
	15.2. B o t o	115,684,086.17
	15.3. Prunggahan Kulon	340,168,120.03
	15.4. Tegalagung	99,467,467.55
	15.5. Bektiharjo	425,448,466.82
	15.6. N g i n o	196,996,171.41

20/7/1

(1)	(2)	(3)
	15.7. Prungahan Wetan	46,159,624.23
	15.8. Sambongrejo	171,933,868.28
	15.9. Semanding	86,523,516.33
	15.10. Bejagung	86,311,462.51
	15.11. Penambangan	269,107,192.56
	15.12. Genaharjo	190,861,388.24
	15.13. Kowang	196,410,237.34
	15.14. Tunah	176,604,518.26
	15.15. Gesing	183,847,929.96
16	KEC. TUBAN	
	16.1. Sumurgung	168,865,912.82
	16.2. Sugiharjo	257,541,495.63
	16.3. Kembangbilo	120,081,233.12
17	KEC. PLUMPANG	
	17.1. Trutup	104,740,780.16
	17.2. Kesamben	217,438,231.51
	17.3. Kepohagung	199,165,451.21
	17.4. Kedungrojo	125,118,048.73
	17.5. Sumurjalak	228,154,932.91
	17.6. Sembungrejo	105,512,350.54
	17.7. Sumberagung	258,253,642.82
	17.8. Cangkring	90,166,780.75
	17.9. Plumpang	179,457,488.20
	17.10. Plandirejo	162,671,727.36
	17.11. Ngrayung	89,775,308.76
	17.12. Bandungrejo	148,725,254.91
	17.13. Jatimulyo	196,226,438.61
	17.14. Klotok	297,666,338.81
	17.15. Magersari	254,187,544.00
	17.16. Kebomlati	230,301,606.82
	17.17. Penidon	314,764,412.76
	17.18. Kedungsoko	222,571,560.69
18	KEC. PALANG	
	18.1. Tasikmadu	159,000,049.88
	18.2. Tegalbang	134,533,709.15
	18.3. Sumurgung	91,456,069.06
	18.4. Kradenan	64,655,807.59
	18.5. Dawung	113,788,986.84
	18.6. Cendoro	164,182,500.54
	18.7. Ngimbang	242,561,890.67
	18.8. Pucangan	173,750,953.59
	18.9. Gesikharjo	89,717,745.50
	18.10. Palang	114,902,443.51
	18.11. Glodog	108,754,114.25

20/1/12

(1)	(2)	(3)
	18.12. Lerankulon	226,335,037.44
	18.13. Leranwetan	193,137,113.18
	18.14. Wangun	209,627,918.48
	18.15. Karangagung	160,865,248.19
	18.16. Pliwetan	58,250,426.60
	18.17. Cepokorejo	155,357,160.60
	18.18. Ketambul	144,383,454.03
19	KEC. WIDANG	
	19.1. Patihan	162,274,299.16
	19.2. Minohorejo	226,519,015.31
	19.3. Mrutuk	186,381,286.74
	19.4. Compreng	111,920,350.42
	19.5. Sumberjo	211,960,408.46
	19.6. Ngadipuro	164,442,313.91
	19.7. Ngadirejo	141,969,246.97
	19.8. Bunut	87,706,853.47
	19.9. Widang	107,247,914.45
	19.10. Banjar	61,431,345.07
	19.11. Tegalsari	116,196,915.54
	19.12. Mlangi	216,489,461.58
	19.13. Simorejo	186,393,912.51
	19.14. Kedungharjo	93,612,682.99
	19.15. Kujung	123,689,854.84
	19.16. Tegalrejo	121,612,166.51
20	KEC. GRABAGAN	
	20.1. Ngarum	92,565,631.62
	20.2. Ngrejeng	197,767,222.03
	20.3. Banyubang	288,561,148.85
	20.4. Grabagan	266,469,648.67
	20.5. Waleran	289,850,979.78
	20.6. Gesikan	333,527,882.69
	20.7. Ngandong	345,593,224.27
	20.8. D a h o r	130,966,347.73
	20.9. Dermawuharjo	138,151,297.04
	20.10. Menyunyur	65,881,899.71
	20.11. P a k i s	130,570,984.20
TOTAL		46,761,838,878.00


 BUPATI TUBAN,
 H. FATHUL HUDA